Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-3 Juli
(14 s.d. 20 Juli 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

UPAYA PEMERINTAH MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* MELALUI PROGRAM GENTING

Tri Rini Puji Lestari
Analis Legislatif Ahli Madya
tri.lestari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, tingkat *stunting* pada anak balita di seluruh Indonesia masih mencapai 21,5 persen, masih jauh dari sasaran 14 persen yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, pada 5 Desember 2024, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkenalkan Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*) sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat penurunan angka *stunting* melalui kerja sama berbagai pihak, termasuk sektor swasta, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), dan masyarakat.

Program Genting adalah suatu upaya sosial yang mengajak individu, lembaga, dan pelaku usaha menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko mengalami *stunting*. Hingga Juli 2025, program ini telah melayani lebih dari 229 ribu anak asuh dan mampu mengumpulkan dana sebesar Rp226 miliar untuk mendukung intervensi gizi, perbaikan sanitasi, dan pemantauan pertumbuhan serta perkembangan anak. BKKBN menargetkan satu juta anak berisiko *stunting* dapat dijangkau dan dibina melalui Program Genting hingga akhir tahun 2025. Target ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan *stunting* secara nasional.

Di berbagai wilayah, pelaksanaan Program Genting menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Contohnya di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah setempat bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program, sehingga menciptakan model kolaboratif yang dapat diterapkan di daerah lain. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh sebagai bagian dari Program Genting mencerminkan dukungan nyata dari pemerintah daerah dalam upaya pencegahan *stunting* di masyarakat.

Contoh keberhasilan Program Genting lainnya dapat dilihat di Provinsi Jawa Timur, yang berhasil menurunkan angka *stunting* menjadi 14,7 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program di wilayah tersebut. Keberhasilan di tingkat daerah ini sejalan dengan penguatan kolaborasi di tingkat nasional sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan *stunting.*

Kolaborasi antarinstansi terus diperkuat, termasuk melalui kerja sama BKKBN dengan lembaga filantropi dan swasta. BSI Maslahat (sebuah lembaga filantropi), mendukung program ini dengan penyaluran bantuan gizi, mendampingi keluarga, serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi bagi kelompok berisiko *stunting*. Sementara itu, di Sumatera Barat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan turut berkontribusi melalui donasi dan pembinaan komunitas orang tua asuh.

Namun, di balik keberhasilan Program Genting, terdapat beberapa tantangan penting. *Pertama*, keefektifan pengelolaan dana dan penyaluran bantuan masih belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan organisasi yang solid atau akses ke

mitra strategis, seperti yang terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. *Kedua*, ketepatan informasi mengenai anak-anak yang berisiko *stunting* berpotensi mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian bantuan dan penyaluran yang tidak tepat. *Ketiga*, konsep pengasuhan yang dilakukan secara sukarela memerlukan sistem pemantauan dan penilaian yang ketat agar dukungan jangka panjang dapat terjamin, bukan hanya bantuan sementara.

Masalah lain yang muncul adalah potensi ketergantungan pada sumbangan sukarela, seperti donasi untuk makanan bergizi dan dukungan non-nutrisi bagi kelompok sasaran. Walaupun program ini mendorong solidaritas sosial, usaha yang sistematis untuk memperkuat layanan dasar, seperti posyandu, puskesmas, dan pendidikan gizi tetap harus menjadi fokus utama dalam strategi nasional untuk mengatasi *stunting*. Pemerintah harus memastikan bahwa Program Genting berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti dari intervensi negara.

Dengan demikian, Program Genting menunjukkan usaha yang kreatif dan melibatkan masyarakat dalam mengurangi angka *stunting* di Indonesia. Walaupun menunjukkan hasil yang baik, keberhasilan program ini tetap dipengaruhi oleh peningkatan pengelolaan, perpaduan data, dan kesinambungan kerja sama antara berbagai sektor. Di masa mendatang, perlu ada evaluasi untuk memastikan bahwa sumbangan dari para "orang tua asuh" dapat terus berjalan, dapat diukur, dan sesuai dengan rencana tindakan nasional untuk mempercepat pengurangan *stunting* secara menyeluruh.

Atensi DPR

Langkah konkret yang perlu diambil oleh Komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan Program Genting ke depan meliputi beberapa hal berikut:

- Mendorong peningkatan akurasi data sasaran melalui pengawasan pelaksanaan pendataan keluarga berisiko *stunting* oleh BKKBN.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, yang mencakup pemerataan pelaksanaan di daerah tertinggal dan keterlibatan swasta.
- Mendorong integrasi Program Genting dengan layanan primer, seperti posyandu, puskesmas, dan pendidikan tentang gizi.
- Membuka ruang dialog dan kemitraan antara BKKBN, lembaga donor, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk memperluas partisipasi publik.
- Mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, termasuk kontribusi dari APBN dan non-APBN, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
- Memberikan masukan terhadap kebijakan lintas sektor, agar program Genting terintegrasi dalam strategi nasional penurunan *stunting* yang berkelanjutan, dan tidak terpisah dari upaya pemerintah yang lebih luas.

Sumber

antara.com, 15 & 18 Juli 2025;
bsimaslahat.or.id, 17 Juli 2025;
liputan7.id, 17 Juli 2025.
Media Indonesia, 17 Juli 2025;
rri.co.id, 17 Juli 2025; dan
suaramerdeka.com, 17 Juli 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman, Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Mandala Harefa, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Venti Eka Satya, Teddy Prasetiawan
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Masyithah Aulia A., Ulayya Sarfina, Yosephus Mainake, M. Z. Emir Zanggi, Muhammad Insan F., Audry Amaradyaputri, Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making